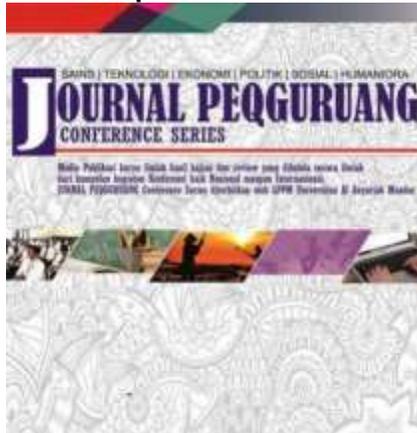


### Graphical abstract



## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TAWALIAN TIMUR KECAMATAN TAWALIAN KABUPATEN MAMASA

<sup>1</sup>Dominggus Taruk Langi, <sup>1</sup>Sjuaib Hannan, <sup>1</sup>Rustan, Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[dominggustaruk80@gmail.com](mailto:dominggustaruk80@gmail.com)

### Abstract

This research was conducted at the Regional Office of BPD in Tawalian Timur Village, Mamasa Regency and this study aimed to find out how the implementation of the function of the District of Mamasa in realizing the effectiveness of the performance of the BPD in implementing the function of the BPD of Mamasa Regency and the factors that influence the implementation of the function of the BPD. The results of this study explain that the function of making regulations can be better implemented and realized, in contrast to the function in accommodating the aspirations of the community in supervising the performance of the Village Head which has not been maximized in its implementation due to the lack of BPD members' understanding of their duties and functions based on applicable regulations.

**Keywords:** BPD Performance, Implementation, implementation of BPD Functions.

### Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BPD Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Kabupaten Mamasa dalam mewujudkan Epektifitas kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi BPD Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwafungsi pada pembuatan regulasi lebih dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturanyang berlaku.

**Kata Kunci :** Kinerja BPD, Pelaksanaan, pelaksanaan Fungsi BPD.

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.1043>

Received : 20 Juli 2020 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

BPD mempunyai tanggungjawab bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dengan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai perwakilan masyarakat, dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Disamping itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa.

Maka dari itu, BPD selaku badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa sendiri dan dipilih secara terbuka dan demokratis. Selain menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan warga masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan berbagai kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya. Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian berbagai latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik ingin mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Tawalian Timur mengenai pelaksanaan fungsinya jika ditinjau dari sisi Pelaksanaan. Oleh karena itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu *"Pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa"*.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil dalam proposal adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian survey, wawancara. Dalam penelitian ini, informasi di kumpulkan dari responden yaitu kepala desa, badan perwakilan desa serta masyarakat.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Di desa Tawalian Timur Penulis memilih sebagai lokasi penelitian tepatnya di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa dimana desa tersebut terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa

yang berjumlah 9 orang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Dan dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tawalian Timur guna untuk melaksanakan kewenangan sebagai pemerintah Desa, sehingga banyaknya permasalahan yang dapat timbul terkait pelaksanaan fungsi masyarakat dalam menunjang pembangunan secara maksimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret pada Tahun 2020.

### Tehnik Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data ini dalam hal penelitian penulis menggunakan antara lain : Penelitian yang bersifat kepustakaan (library research), dan Penelitian Lapangan, dan Tehnik Analisis Data

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

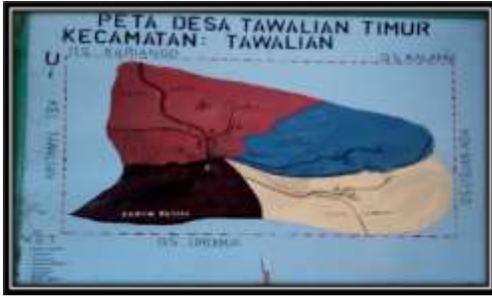
Selaku Badan Pengawas Desa terdapat komponen dalam Pemerintah Desa yang memiliki peran aktif yang sangat vital terhadap kontribusi dan kemajuan suatu desa khususnya pada penyaluran aspirasi masyarakat desa.

Adanya kejelasan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu fungsi legislatif yang telah dijelaskan secara terstruktur oleh Prmendagri bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran aktif yang membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa bersama dengan kepala Desa, disamping itu Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi sebagai penampung penyalur aspirasi masyarakat di suatu desa.

### Keadaan Geografi

Dari sudut pandang geografis wilayah Desa Tawalian Timur merupakan salah satu Desa di Kabupaten Mamasa yang mempunyai luas wilayah mencapai kurang lebih 506 Ha. Adapun jumlah penduduk Desa Tawalian Timur sebanyak 2051 Jiwa dan 649 KK. Desa Tawalian Timur merupakan salah satu desa dari tiga desa yang ada di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa. Desa Tawalian Timur berada dengan posisi wilayahnya perbukitan atau wilayah tinggi berupa pegunungan. Desa Tawalian Timur terletak disebelah Utara dari Kelurahan Tawalian yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu ± 60 menit.

Berikut adalah gambar dari peta Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa.



Fungsi BPD sudah berjalan sesuai aturan yang ada meskipun belum maksimal karena sebagian anggota BPD belum mengetahui betul tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD, Merumuskan dan mengusulkan program, serta pelaksanaan peraturan-peraturan desa.

Faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu penyediaan sarana dan prasarana belum memadai, anggaran yang masuk belum mencukupi, kurangnya pelatihan-pelatihan pada anggota BPD.

Untuk menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional maka dituntut adanya hubungan dan kerja sama yang baik dan harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa, dengan maksud agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik dengan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa, dan ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang mampu melayani dengan baik, bentuk hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik serta berkelanjutan. Keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa akan mempengaruhi suatu aspirasi masyarakat sebagai objek untuk menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Desa. Dengan berlakunya Undang-undang Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dari rangkaian diatas maka sangat dibutuhkan adanya sosialisasi yang secara aktif harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Pemerintah Desa dan maupun dari anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, dan ini sangat diharapkan supaya mampu memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa ataupun masyarakat itu sendiri tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan pelaksanaan sosialisasi ini belum ada yang diterapkan di Desa Tawalian Timur. Sedangkan sosialisasi ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1) Dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditemukan masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Tawalian Timur karena masih sangat kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Sedangkan diketahui bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan suatu pengawasan kinerja Kepala Desa Tawalian Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pada pembuatan regulasi lebih terlaksana dan teralisasi, berbeda dengan fungsinya yang menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal pada pelaksanaannya disebabkan karena masih sangat kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang telah berlaku kotor.

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa ;

#### A. Faktor Pendukung

- ✓ Warga Masyarakat Desa Tawalian Timur
- ✓ Interaksi dan pola hubungan masyarakat
- ✓ Pendapatan Isentif
- ✓ Pelatihan kepada anggota BPD
- ✓ Sistem Pemilihan anggota BPD
- ✓ Sarana dan Prasarana

#### B. Faktor Penghambat

- a) BPD dan masyarakat masih kurangnya memahami tugas dan fungsi BPD sesuai dengan peraturan Pemerintah Desa yang berlaku.
- b) Tidak terlaksana sosialisasi dari Pemerintah Desa dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- c) Sarana dan prasarana sampai saat ini belum dapat dikatakan memadai
- d) Tidak adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk Anggota BPD dalam meningkatkan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa..

### Saran

1. Dalam peningkatan diperlukan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD di

Desa Tawalian Timur agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pada pengawasan APBDes serta peraturan desa dapat berjalan dengan secara maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan maka dapat dilakukan pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD diperlukan sosialisasi yang secara menyeluruh dan aktif dengan melakukan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tawalian Timur. Selain itu dari segi anggaran atau pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD. Akan tetapi jika penyelenggaraan BPD di Desa Tawalian Timur telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku di Pemerintah Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asang, Sulaiman , 2011. *Pembangunan Sumber Daya Manusia* :Suatu Perpektif Organisasi Publik. Jurnal Administrasi Negara, Vol.1 Maret 2011 (ISSN : 1410-8399
- Asang, Sulaiman, 2005. *Dimensi Institusional dan Prilaku dalam PSDM Aparatur Lembaga Publik*, Jurnal Administrasi Negara.Makassar : STIA LAN
- Ahmad, Ali 2015. *Mengkuak Tabir Hukum*, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.W.Widjaya, 2003.*Pemerintahan Desa/marga*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Burhan Ashofa, 2007 *,Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Barzun, J., & graff, H. G. (1985).*The Modern researcher* (Edisi ke-4) New York : Harcourt Brace & World.
- Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Barat, 2008.Buku Pedoman Pelestarian dan Pembangunan Desa, Balai Pengelola Kepurbakalan, Jawa barat.
- Melisa Fitrah. 2009. *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa"*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS, Makasaar
- Hamid, A. 2003.*Siri' dan Etos kerja*, dalam Siri dan Passe' Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Mustafa, dkk, (ed). Makassar : Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan 2003.*Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Kasnawi, Tahir dan Sulaiman Asang. 2009, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Surabaya : Universitas Terbuka.
- Morgan, G. 1991. *Images Of Organization California* : SAGE Publications, Inc
- Jamali, Abdoel.20112 *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-18
- Rahman, Ali 2013. *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Mentri Di indonesia*, Skripsi. Bagian Hukum Adminstrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ratminto & Atik S.W. 2005. *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Chitezen Charter dan Standar Pelayanan Minimum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Salim, 2010.*Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Segioyono.2012. *Metode Penelitian Pendidikan*"Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*. Citar Aditya Bakti, Bandung.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soehino, 1984.*Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty,Yogyakarta.
- Simbolon, Maringan Masri. 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, Edilius. 2002, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta.

Wikipedia, 2015. *Kabupaten pangkajene dan kepulauan*, ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pangkajene\\_dan\\_Kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan)), diakses pada tanggal 17 oktober 2016